

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Farabi. *Al-Madinah al-Fadhilah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2019.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pustaka, 2016.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Demokrasi dalam Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ateng, Syafrudin. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Banten Tahun 2023*. Serang: BPS Provinsi Banten, 2024.
- Banten Transparency Institute (BTI). *Catatan Publik atas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Banten Tahun 2022*. Serang: BTI, 2023.

- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2017.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. *Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Semester I Tahun 2023*. Jakarta: Kemendagri, 2023.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. *Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Semester I Tahun 2023*. Jakarta: Kemendagri, 2024.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Firmansyah. *Teori Politik: Konsep dan Aplikasi Dalam Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Hari, Kusuma. *Perkembangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Hartono, Agus. *Pengantar Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Haryanto. *Politik dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Heywood, Andrew. *Pengantar Teori Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes, Khilafah No!*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2021.

- Ibn Taimiyyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyah*. Jakarta: Darul Falah, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamma, Hamzah, dkk. *Fiqih Siyasah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Karimuddin, Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 2022.
- Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman Pelaporan Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri, 2024.
- Latief, Abdul. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2019.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Manan, Bagir. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Marbun, Benny Nurjaman. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nugroho. *Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Pranoto. *Demokrasi dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Priyono, Bambang. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Rahardjo, Dawam. *Etika Politik Islam*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Genta Press, 2019.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Riyanto. *Teori-Teori Politik Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Sulaiman, Asep. *Politik Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suryadi, Hadi. *Administrasi Publik dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suteki & Galang Taufani. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Syafrudin, Ahmad. *Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2021.
- Syam, Nur. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Syamsuddin. *Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Wahyudi. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Wahyudi, Andi & Ricky Noor Permadi. *Desentralisasi dan Inovasi Daerah*. Bandung, 2020.
- Wasistiono, Sadu. *Kepemimpinan Kepala Daerah di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2017.

Yamin, M. *Konstitusi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Yuliani. *Kinerja Pemerintahan Dalam Perspektif Politik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Yusdianto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Dewi, Amelia Kusuma. *Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Serta Hukum Positif*. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2024.

Djidar, Haedar, Dandi Darmadi, & Andi Besse Panangareng. *Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2021-2026*. *Journal Publicuho*, 2024.

Heldi, dkk. *Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 2021.

Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, & Nafi Mubarak. *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024*. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2022.

Mahardika, Ahmad Gelora, Sun Fatayati, & Ferry Nahdian Furqan. *Problematisasi yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2022.

Ramanda, Dio Ekie. *Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JISIP*, 2022.

Suyatno. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. *Politik Indonesia: Indonesian Politic Science Review* 1, 2016.

SKRIPSI

- Aulia, Syarifah. *Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fikih Siyasah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Dewi, Amelia Kusuma. *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif*. IAIN Ponorogo, 2024.
- Halfia. *Kekuasaan, Kewenangan dan Legitimasi Politik*. Universitas Halu Oleo Kendari, 2014.
- Handayani, Fifi. *Legitimasi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri Tanpa Aturan Pelaksan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Kurnia, Eva. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.
- Suarna, Alan. *Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sulaiman, Abila Ibnu. *Penunjukan Penjabat Gubernur Banten Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.
- Sundari, Pevi. *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Penjabat PJ Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Universitas Jambi, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

WEBSITE/BERITA ONLINE

DPRD Provinsi Banten. Pernyataan Resmi DPRD atas Penunjukan Penjabat Gubernur Banten. Serang, 16 Mei 2022.

Pemerintah Provinsi Banten. Al Muktabar Kembali Dilantik Menjadi Penjabat Gubernur Banten. Diakses melalui <https://www.bantenprov.go.id> pada 11 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023. Diakses melalui <https://www.bantenprov.go.id> pada 01 November 2025.

Radar Banten. *“LSM Soroti Transparansi Anggaran Pemprov Banten di Masa Penjabat Gubernur”*, 12 September 2023.

Republika.co.id. *“Tokoh Banten Dukung Al Muktabar karena Dinilai Dekat dengan Ulama dan Pesantren”*, 15 Mei 2022.

Tempo.co. Pro Kontra Penunjukan Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten. 13 Mei 2022.